

Determinan kemiskinan multidimensi rumah tangga di Provinsi Banten tahun 2020

Determinants of household multidimensional poverty in Banten Province, 2020

Katrin Edvirgis Beribe* dan Budyandra

Politeknik Statiskia STIS

*Korespondensi penulis: katrin.beribe@bps.go.id

ABSTRACT

The measure of poverty is often one of the benchmarks in assessing the success of development. However, measuring poverty using the monetary approach might only capture a small part of the poverty problem. Therefore, a multidimensional approach is also needed to fully understand the poverty problem. Banten Province has been chosen as a study site since it has the highest multidimensional poverty rate on Java Island. It is also the only province with a higher multidimensional poverty rate than the monetary poverty rate in 2018 on Java Island. This study aims to calculate the percentage of multidimensional poor households in each regency/municipality to determine the general description and variables that affect households' multidimensional poor status in Banten in 2020. Multidimensional poor status is determined using the Alkire-Foster method. The analytical methods used are descriptive and inferential analysis using multilevel binary logistic regression. The results show that education level of household head, occupation type of household head, number of household members, classification of residence area, monetary-poor status of the household, unemployment rate, length percentage of roads with good and moderate conditions, and expected years of schooling significantly affect households' multidimensional poor status in Banten in 2020.

Keywords: multidimensional poverty, Alkire-Foster, Banten Province

ABSTRAK

Ukuran kemiskinan seringkali menjadi salah satu tolak ukur dalam menilai keberhasilan pembangunan. Namun, pengukuran kemiskinan dengan pendekatan moneter hanya mampu memotret sebagian kecil dari begitu besarnya persoalan kemiskinan. Oleh karena itu, pengukuran kemiskinan dengan pendekatan multidimensi juga diperlukan untuk memahami persoalan kemiskinan secara utuh. Provinsi Banten dipilih menjadi fokus kajian ini karena provinsi ini memiliki angka kemiskinan multidimensi tertinggi di Pulau Jawa. Provinsi ini juga merupakan satu-satunya provinsi di Pulau Jawa yang memiliki angka kemiskinan multidimensi lebih tinggi dibandingkan angka kemiskinan moneter pada tahun 2018. Penelitian ini bertujuan untuk menghitung persentase rumah tangga miskin multidimensi di setiap kabupaten/kota, mengetahui gambaran umum serta variabel pada level individual dan kontekstual yang memengaruhi status miskin multidimensi rumah tangga di Banten pada tahun 2020. Penentuan status miskin multidimensi rumah tangga dilakukan dengan menggunakan metode Alkire-Foster. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis inferensial dengan menggunakan regresi logistik biner multilevel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan tertinggi kepala rumah tangga, jenis pekerjaan kepala rumah tangga, jumlah anggota rumah tangga, klasifikasi wilayah tempat tinggal, status miskin moneter rumah tangga, harapan lama sekolah (HLS), tingkat pengangguran terbuka (TPT), dan persentase panjang jalan dengan kondisi baik dan sedang berpengaruh signifikan terhadap status miskin multidimensi rumah tangga pada kabupaten/kota di Banten pada tahun 2020.

Kata kunci: kemiskinan multidimensi, Alkire-Foster, Provinsi Banten



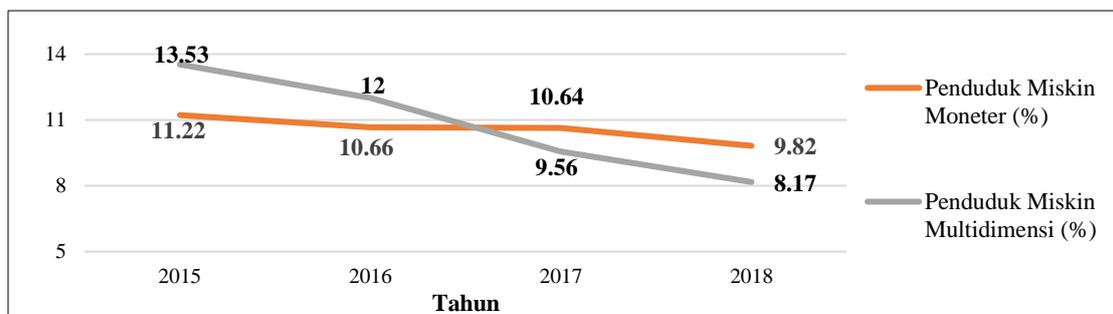
PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan masalah sosial ekonomi yang masih dihadapi berbagai negara di dunia. Keberhasilan menanggulangi kemiskinan dan menurunkan ketimpangan pendapatan antarpenduduk merupakan salah satu ciri pembangunan dapat dikatakan berhasil (Todaro, 2010). Di Indonesia, pendekatan moneter melalui konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*) digunakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengukur kemiskinan. Dengan pendekatan ini, kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Namun, ukuran ini dianggap hanya memotret sebagian kecil dari begitu besarnya persoalan kemiskinan (Sen, 1985; 1999). Pendekatan ini dinilai terlalu sederhana dan menyeragamkan pola konsumsi setiap orang, padahal tidak semua kebutuhan dapat dinilai dengan uang dan uang tidak selalu dapat diubah menjadi kebutuhan (Alkire & Santos, 2014). Sen (1985) juga mengamati perbedaan kemampuan tiap orang untuk mengonversi pendapatannya.

Pendekatan multidimensi dapat digunakan untuk melihat kemiskinan secara holistik. Salah satu ukurannya adalah Multidimensional Poverty

Index (MPI) atau Indeks Kemiskinan Multidimensi (IKM). Tidak seperti ukuran kemiskinan moneter yang mengukur kemiskinan melalui proksi konsumsi, pendekatan multidimensi mengukur kemiskinan secara langsung pada dimensi kehidupan yang penting, seperti kesehatan, pendidikan, dan taraf hidup (Alkire & Santos, 2014). Oleh karena itu, kemiskinan dilihat sebagai kondisi saat seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak.

Salah satu inisiatif penyusunan informasi kemiskinan multidimensi di Indonesia telah dilakukan oleh Perkumpulan Prakarsa. Berdasarkan hasil perhitungan mereka, persentase penduduk miskin dilihat dari pendekatan multidimensi pada periode 2015–2018 menunjukkan tren penurunan sejalan dengan data tren kemiskinan moneter BPS (Gambar 1). Penurunan ini juga tercatat lebih progresif dibandingkan penurunan persentase penduduk miskin moneter pada tahun 2017 dan 2018. Pada level nasional, persentase penduduk miskin multidimensi sudah lebih rendah dibandingkan dengan persentase penduduk miskin moneter



Gambar 1. Persentase Penduduk Miskin Moneter dan Multidimensi di Indonesia tahun 2015–2018

Sumber: Olah data BPS (2021) dan Perkumpulan Prakarsa (2020)

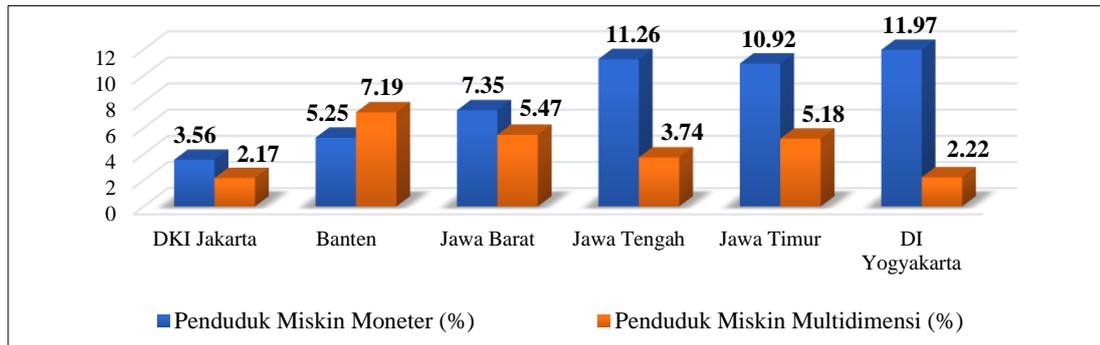
Meskipun demikian, sebanyak 19 provinsi di Indonesia masih memiliki persentase penduduk miskin multidimensi yang lebih tinggi pada tahun 2018. Kondisi ini menunjukkan bahwa terdapat kelompok penduduk di wilayah-wilayah tersebut yang tidak teridentifikasi sebagai penduduk miskin secara moneter, tetapi teridentifikasi sebagai penduduk miskin multidimensi. Artinya, meskipun kelompok penduduk tersebut sudah

dianggap mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dari sisi ekonomi, baik kebutuhan makanan maupun bukan makanan, mereka belum mampu memenuhi kebutuhan dasar yang diukur dari sisi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup (Perkumpulan Prakarsa, 2020).

Pentingnya penyusunan informasi kemiskinan multidimensi menjadi landasan utama bagi kajian

mengenai kemiskinan dari sisi multidimensi dalam penelitian ini. Selain itu, kajian ini menyajikan tambahan informasi terkait

kemiskinan multidimensi dengan melakukan perhitungan persentase kemiskinan multidimensi tahun 2020.



Gambar 2. Persentase Penduduk Miskin Moneter dan Multidimensi menurut Provinsi di Pulau Jawa tahun 2018

Sumber: BPS (2021) dan Perkumpulan Prakarsa (2020)

Kajian ini berfokus di Provinsi Banten yang menjadi satu-satunya provinsi di Pulau Jawa yang memiliki angka kemiskinan multidimensi lebih tinggi dibandingkan angka kemiskinan moneter pada tahun 2018. Gambar 2 menunjukkan angka kemiskinan moneter Provinsi Banten pada tahun 2018 sebesar 5,25% atau sebanyak 662 ribu jiwa, terendah kedua di Pulau Jawa setelah DKI Jakarta. Hasil perhitungan Perkumpulan Prakarsa untuk tahun yang sama menunjukkan angka kemiskinan multidimensi tertinggi di Pulau Jawa terdapat di Provinsi Banten, yaitu sebesar 7,19% atau sebanyak 906 ribu penduduk. Kondisi ini menunjukkan bahwa aspek kehidupan dilihat dari dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup di Banten relatif masih tertinggal meskipun kondisi ekonomi Banten sudah relatif lebih baik dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Jawa. Sebagai provinsi yang terletak di Pulau Jawa yang menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian Indonesia, angka kemiskinan yang dicapai juga belum memenuhi target pemerintah daerah, yaitu angka kemiskinan sebesar 5,13% pada tahun 2018 seperti yang tercantum dalam Peraturan Daerah Provinsi Banten No. 10/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No. 7/2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022. Dengan

demikian, kemiskinan masih menjadi salah satu masalah yang belum teratasi di wilayah ini.

Provinsi Banten yang berada di wilayah ujung barat Pulau Jawa memiliki posisi yang strategis dan potensi ekonomi yang sangat besar. Posisinya sebagai penyangga ibu kota DKI Jakarta juga memberi keuntungan tersendiri bagi pembangunan Banten. Namun, masih tingginya angka kemiskinan multidimensi di Banten menunjukkan kondisi yang kontradiktif dengan potensi yang dimiliki wilayah tersebut.

Jika dikaitkan dengan indikator pembangunan penting lainnya seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Banten berada di posisi yang relatif baik, yakni tertinggi ketiga di Pulau Jawa setelah DKI Jakarta dan DI Yogyakarta pada tahun 2018 (BPS, 2021). IPM memuat tiga dimensi penting pembangunan, yaitu pemenuhan aspek kebutuhan akan hidup panjang umur dan hidup sehat, aspek pengetahuan, dan akses terhadap sumber daya yang bisa memenuhi standar hidup. Beberapa penelitian terdahulu menemukan hubungan yang kuat dan negatif antara IPM dan IKM (Huda, 2020; Setyani, 2021). Dapat dikatakan, kualitas sumber daya manusia yang baik akan menurunkan tingkat kemiskinan multidimensi. Namun, kondisi yang berbeda terjadi di Provinsi Banten.

Beberapa penelitian guna mengetahui determinan kemiskinan multidimensi telah

dilakukan sebelumnya. Sekarwati dkk. (2019) menemukan bahwa klasifikasi wilayah tempat tinggal, jumlah anggota rumah tangga, tingkat pendidikan kepala rumah tangga (KRT), akses internet, kepemilikan telepon genggam, dan pengeluaran per kapita berpengaruh terhadap status miskin multidimensi rumah tangga. Studi lainnya oleh Salam dkk. (2020) mengidentifikasi determinan status miskin multidimensi rumah tangga di wilayah perkotaan dan perdesaan. Studi tersebut menemukan bahwa jenis kelamin KRT, pekerjaan KRT, rasio ketergantungan, adanya penyandang disabilitas dalam rumah tangga, tingkat pendidikan KRT, dan akses kredit formal berpengaruh terhadap kemiskinan multidimensi di kedua wilayah. Sementara itu, kondisi jalan utama hanya berpengaruh di wilayah perdesaan, sedangkan status bekerja KRT hanya berpengaruh di wilayah perkotaan. Selanjutnya, penelitian Usman (2017) menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi regional, pengeluaran pemerintah sektor kesehatan dan infrastruktur memiliki pengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin multidimensi. Kajian Setyani (2021) menemukan bahwa rasio ketergantungan, IPM, rasio rumah sakit terhadap penduduk, persentase desa dengan permukaan jalan mayoritas aspal, dan persentase desa tanpa sinyal internet memiliki pengaruh signifikan terhadap angka kemiskinan multidimensi.

Berdasarkan pemaparan tersebut, tujuan penelitian ini adalah menghitung persentase rumah tangga miskin multidimensi di tingkat kabupaten/kota di Provinsi Banten tahun 2020, mengkaji gambaran umum kemiskinan multidimensi rumah tangga di Provinsi Banten tahun 2020, mengidentifikasi determinan status miskin multidimensi rumah tangga di Provinsi Banten tahun 2020, serta mengidentifikasi kecenderungan variabel-variabel yang memengaruhi status miskin multidimensi rumah tangga di Provinsi Banten tahun 2020.

METODE

Landasan Teori

Dalam menghitung kemiskinan, World Bank dan BPS menggunakan pendekatan moneter yang

didasarkan pada garis kemiskinan (GK). GK adalah standar minimum yang dibutuhkan oleh seseorang atau rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar makanan dan nonmakanannya pada suatu waktu dan lokasi tertentu (World Bank, 2015). Seseorang dikatakan miskin apabila memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah GK. Oleh karena itu, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Beberapa ahli mengatakan bahwa kemiskinan bersifat multidimensi dan pendekatan moneter kurang mampu memberikan gambaran kondisi kemiskinan yang sebenarnya. Menurut Laderchi dkk. (2003), perhitungan kemiskinan moneter tidak melihat situasi kelangkaan barang di pasar, hanya mengakomodasi barang privat, dan tidak memperhitungkan komponen pendapatan sosial.

Sen (1989) memperluas pendekatan penghitungan kemiskinan menjadi berbasis pendekatan kapabilitas yang mempertimbangkan kemiskinan secara multidimensi. Dalam pendekatan kapabilitas, kemiskinan didefinisikan sebagai deprivasi/kekurangan atau kegagalan untuk mencapai kemampuan dasar tertentu yang sangat penting hingga tingkat minimal tertentu yang memadai. Kemiskinan multidimensi tidak hanya dapat menangkap jumlah penduduk miskin, tetapi juga memberitahu karakteristik kemiskinan yang dialami oleh penduduk tersebut. Informasi ini dapat menjadi landasan kebijakan pemerintah yang lebih tepat.

Alkire dan Foster (2007) mengembangkan metode pengukuran kemiskinan multidimensi dengan nama the Alkire-Foster Method yang kemudian digunakan oleh Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI) dan United Nations Development Programme (UNDP) untuk merumuskan Multidimensional Poverty Index (MPI) Global. Tiga dimensi dalam MPI Global meliputi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. Seseorang dikatakan miskin apabila hak dasarnya di bidang pendidikan, kesehatan, dan standar hidup tidak terpenuhi. Pengukuran MPI dengan metode Alkire-Foster menggunakan penimbang yang sama, yaitu

sebesar 1/3 untuk masing-masing dimensi dan penimbang yang sama untuk setiap indikator dalam satu dimensi.

Penyusunan Indeks Kemiskinan Multidimensi (IKM) Indonesia sudah dilakukan salah satunya oleh Perkumpulan Prakarsa. Indeks disusun dengan menggunakan data Susenas, baik Kor maupun Modul Konsumsi/Pengeluaran, dan metode Alkire-Foster dengan mengacu pada dimensi dan indikator MPI Global, namun

terdapat modifikasi komposisi indikator. Modifikasi tersebut bertujuan untuk menyesuaikan tren pembangunan terbaru dan lebih merefleksikan kondisi kemiskinan yang sesungguhnya di Indonesia. Perhitungan IKM Indonesia tahun 2015–2018 meliputi tiga dimensi dan delapan indikator. Dimensi, indikator, cut off, dan penimbang yang digunakan oleh Perkumpulan Prakarsa (2020) secara lebih rinci ditampilkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Dimensi, Indikator, Cut Off, dan Penimbang yang Digunakan oleh Perkumpulan Prakarsa

Dimensi	Indikator	Batasan terdeprivasi (<i>cut off</i>)	Penimbang
Kesehatan	Sanitasi	Tidak memiliki fasilitas buang air besar, baik umum, bersama, atau pribadi dan jenis klosetnya bukan leher angsa.	1/9
	Air minum	Menggunakan atau mengonsumsi air bersih yang bukan berasal dari ledeng meteran dan ledeng eceran, atau menggunakan air minum dari pompa, sumur/mata air terlindungi yang berjarak <10 meter dari tangki septik.	1/9
	Gizi	Terdapat balita dengan asupan gizi (energi, protein, lemak, karbohidrat) kurang dari kebutuhan gizi minimal.	1/9
Pendidikan	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Terdapat anak usia 3–6 tahun yang tidak memiliki akses terhadap pendidikan prasekolah, seperti PAUD atau yang setara, Taman Kanak-Kanak (TK) atau yang setara, kelompok bermain, dan pendidikan prasekolah lainnya.	1/6
	Keberlanjutan sekolah	Terdapat anak usia sekolah dasar dan menengah yang tidak mampu menyelesaikan pendidikannya hingga sekolah lanjut tingkat atas, seperti SMA/SMK/MA atau yang sederajat.	1/6
Standar hidup	Bahan bakar memasak	Menggunakan bahan bakar selain listrik dan gas untuk memasak, seperti minyak tanah, arang, breket, dan kayu bakar.	1/9
	Sumber penerangan	Menggunakan listrik untuk penerangan yang bukan berasal dari Perusahaan Listrik Negara (PLN), seperti petromaks/aladin, pelita/senter/obor, dan lain-lain.	1/9
	Kondisi atap, lantai, dan dinding	Setidaknya memiliki kondisi yang tidak layak pada dua dari tiga sub-indikator berikut: <ul style="list-style-type: none"> • Atap terbuat selain dari beton, genteng, seng, dan asbes, seperti bambu, kayu/sirap, jerami/ijuk/daun daunan/rumbia dan lainnya. • Lantai berbahan selain dari marmer, keramik, granit, tegel, teraso, semen, dan kayu, seperti dari bambu, kayu/papan berkualitas rendah, tanah dan bahan lainnya. • Dinding berbahan selain dari tembok dan kayu, seperti anyaman bambu, batang kayu, bambu dan bahan lainnya. 	1/9

Sumber: Perkumpulan Prakarsa (2020).

Teori kemiskinan membedakan penyebab utama kemiskinan dari dua perspektif utama. Pertama, perspektif individualistik yang menempatkan penyebab kemiskinan pada defisiensi atau kekurangan orang miskin untuk mencapai status sosial ekonomi tertentu. Kedua, perspektif

struktural yang menempatkan penyebab kemiskinan pada faktor tingkat makro di luar kendali langsung individu seperti kerentanan geografis, peluang pasar tenaga kerja, dan distribusi sumber daya dapat menentukan kerentanan individu dan masyarakat terhadap

kemiskinan (Bradshaw, 2007; Calnitsky, 2018; Royce, 2019). Sejalan dengan teori-teori tersebut, World Bank (2015) juga menjelaskan bahwa terdapat tiga determinan kemiskinan yang utama, yaitu karakteristik wilayah, masyarakat, serta rumah tangga dan individu.

Berdasarkan karakteristik wilayah, tingkat kemiskinan umumnya tinggi di daerah-daerah yang dicirikan oleh keterisolasian/keterpencilan wilayah, sumber daya alam terbatas, curah hujan rendah, dan kondisi iklim tidak ramah. Karakteristik wilayah lainnya yang juga memengaruhi kemiskinan adalah sistem dan tata pemerintahan. Di tingkat masyarakat, infrastruktur seperti akses jalan beraspal, ketersediaan listrik, kedekatan dengan pasar, ketersediaan sekolah dan fasilitas kesehatan, serta jarak ke pusat pemerintahan setempat menjadi penentu kemiskinan. Selain itu, sumber daya manusia, akses lapangan pekerjaan, mobilitas dan keterwakilan sosial, distribusi lahan, serta jaringan dan modal sosial menjadi penentu kemiskinan. Sementara itu, karakteristik rumah tangga dan individu mencakup karakteristik demografis, ekonomi, dan sosial yang melekat pada rumah tangga dan anggotanya.

Beberapa penyebab kemiskinan tersebut menjadi

dasar penggunaan regresi multilevel dalam kajian ini. Model regresi ini dapat memperhatikan pengaruh variabel di level individual (rumah tangga) dan variabel di level kontekstual (wilayah) terhadap status miskin multidimensi rumah tangga di Provinsi Banten.

Cakupan Penelitian

Penelitian ini menganalisis variabel-variabel yang diduga berpengaruh terhadap status miskin multidimensi rumah tangga di Provinsi Banten tahun 2020. Variabel respons dalam penelitian ini adalah status miskin multidimensi rumah tangga. Variabel penjelas dibagi menjadi faktor individual dan faktor kontekstual. Faktor individual terdiri dari variabel yang diukur pada level rumah tangga antara lain umur KRT, jenis kelamin KRT, pendidikan tertinggi KRT, jenis pekerjaan KRT, jumlah anggota rumah tangga, klasifikasi wilayah tempat tinggal, dan status miskin moneter rumah tangga. Sementara itu, faktor kontekstual terdiri dari variabel yang diukur pada level kabupaten/kota, antara lain harapan lama sekolah (HLS), umur harapan hidup (UHH), tingkat pengangguran terbuka (TPT), dan persentase panjang jalan dengan kondisi baik dan sedang. Pengkategorian variabel yang digunakan adalah sebagai berikut.

Tabel 2. Pengkategorian Variabel

No	Variabel	Kategori	Kode
Variabel respons			
1	Status miskin multidimensi	Miskin Tidak miskin	1 0
Faktor individual			
2	Umur KRT	< 40 tahun 40–60 tahun > 60 tahun	1 2 0
3	Jenis kelamin KRT	Perempuan Laki-laki	1 0
4	Pendidikan tertinggi KRT	≤ SD SMP SMA PT	1 2 3 0
5	Pekerjaan KRT	Tidak bekerja Bekerja di sektor pertanian Bekerja di sektor non pertanian	1 2 0
6	Jumlah anggota rumah tangga	> 4 Orang ≤ 4 Orang	1 0
7	Klasifikasi wilayah tempat tinggal	Perdesaan Perkotaan	1 0
8	Status miskin moneter rumah tangga	Miskin moneter Tidak miskin moneter	1 0

Faktor kontekstual			
9	Harapan lama sekolah (HLS)	-	
10	Umur harapan hidup (UHH)	-	
11	Tingkat pengangguran terbuka (TPT)	-	
12	Persentase jalan dengan kondisi baik dan sedang	-	

Fokus penelitian ini adalah wilayah kabupaten/kota di Provinsi Banten tahun 2020. Unit analisis dalam penelitian ini adalah rumah tangga di Provinsi Banten berdasarkan sampel Susenas Maret 2020 sebanyak 6.964 rumah tangga. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder dari BPS berupa data mentah Susenas KOR dan Modul Konsumsi/Pengeluaran Maret 2020. Data Susenas dipilih karena mampu memberikan informasi berbagai kondisi sosial ekonomi masyarakat yang sangat detail meliputi kondisi pemenuhan kebutuhan hidup, sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, dan sosial ekonomi lainnya yang tercakup dalam penelitian ini. Kajian ini juga memanfaatkan data dari publikasi provinsi dan kota/kabupaten dalam angka tahun 2021 di Provinsi Banten.

Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan terdiri dari analisis deskriptif dan analisis inferensial. Analisis deskriptif mencakup deskripsi gambaran umum kemiskinan multidimensi. Status miskin multidimensi rumah tangga ditentukan menggunakan metode Alkire-Foster. Dimensi indikator, dan penimbang yang digunakan mengacu pada Perkumpulan Prakarsa (2020) yang dapat dilihat pada Tabel 1. Setiap rumah tangga, akan dihitung skor deprivasinya dengan rumus berikut:

$$c_i = \sum_{j=1}^d w_j I_{ij} = w_1 I_{i1} + w_2 I_{i2} + \dots + w_d I_{id} \quad (1)$$

Keterangan:

c_i = skor deprivasi rumah tangga ke- i ; $i=1, \dots, n$

w_j = bobot indikator ke- j ; $j=1, \dots, d$ dan $\sum_{j=1}^d w_j = 1$

I_{ij} = skor rumah tangga ke- i untuk indikator ke- j , nilai $I_{ij} = 1$ jika rumah tangga terdeprivasi pada indikator ke- i dan $I_{ij} = 0$ jika tidak terdeprivasi.

Rumah tangga ke- i dikategorikan sebagai miskin multidimensi jika skor deprivasi $c_i \geq 0,3333$.

Selanjutnya, analisis inferensial digunakan untuk mengetahui variabel yang berpengaruh signifikan serta kecenderungannya dalam memengaruhi status miskin multidimensi rumah tangga. Metode yang digunakan adalah regresi logistik biner multilevel dengan dua level. Unit analisis pada level 1 adalah rumah tangga dan unit analisis pada level 2 adalah kabupaten/kota. Penggunaan metode regresi logistik biner multilevel dikarenakan variabel respons terdiri dari dua kategori (biner) dan diduga terdapat pengaruh perbedaan karakteristik kabupaten/kota terhadap status miskin multidimensi rumah tangga di Provinsi Banten tahun 2020.

Menurut Hox (2010), model regresi multilevel digolongkan menjadi dua bentuk dasar, yaitu model multilevel dengan *random intercept* dan model multilevel dengan *random slope*. Penelitian ini menggunakan model multilevel dengan *random intercept*, yaitu pemodelan *intercept* sebagai *random effect* dari variabel pada level 2 dengan asumsi bahwa setiap kelompok memiliki *intercept* yang berbeda, namun memiliki kemiringan atau *slope* yang sama sehingga pengaruh setiap variabel penjelas terhadap variabel respons sama untuk tiap kelompok. Pada penelitian ini, model multilevel yang digunakan adalah model regresi logistik biner dengan *random intercept* karena model tersebut dapat menjawab tujuan penelitian ini yaitu mengetahui pengaruh variabel prediktor di level 2 tanpa harus membedakan besarnya pengaruh variabel penjelas tersebut di setiap kelompok.

Tahapan analisis inferensial dimulai dengan uji signifikansi efek random dengan uji *Likelihood Ratio (LR)* untuk mengetahui apakah model multilevel lebih baik digunakan dibandingkan model logistik biasa. Selanjutnya, perhitungan

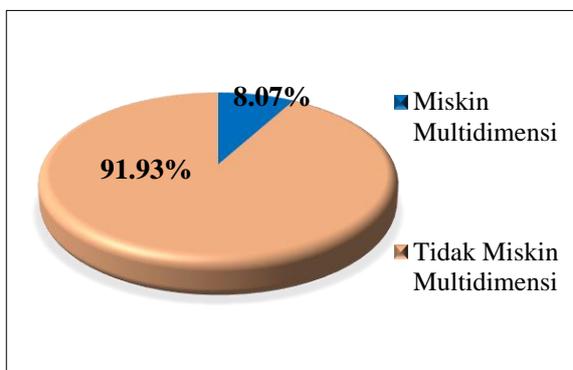
Intraclass Correlation Coefficient (ICC) dilakukan untuk mengukur variasi variabel respons yang dapat dijelaskan oleh perbedaan karakteristik antarkelompok. Uji signifikansi parameter turut dilakukan secara simultan untuk menguji kelayakan model dengan parameter secara menyeluruh dan mengetahui peran variabel prediktor dalam model secara simultan. Uji signifikansi parameter kemudian dilakukan secara parsial dengan uji Wald untuk mengetahui pengaruh variabel prediktor secara individual terhadap variabel respons. Tahap terakhir adalah interpretasi nilai *Odds Ratio* (OR), yaitu besarnya kecenderungan tiap kategori variabel prediktor dalam memengaruhi status miskin multidimensi rumah tangga.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Kemiskinan Multidimensi Rumah Tangga di Provinsi Banten Tahun 2020

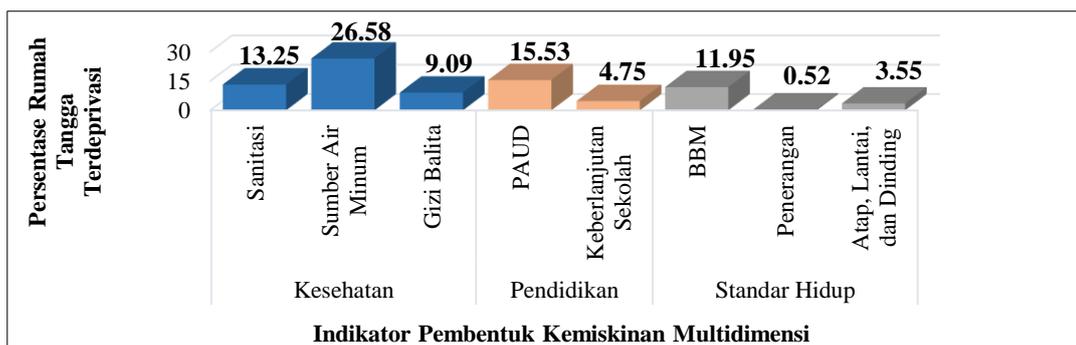
Berdasarkan hasil pengolahan data, persentase rumah tangga berdasarkan status miskin multidimensi di Provinsi Banten tahun 2020 pada Gambar 3, menunjukkan bahwa persentase rumah tangga di Provinsi Banten yang berstatus miskin multidimensi adalah sebesar 8,07%. Dengan kata lain, terdapat sekitar delapan sampai dengan sembilan dari 100 rumah tangga yang

belum bisa memenuhi kebutuhan dasarnya yang diukur dari sisi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. Sementara itu, 91,93% rumah tangga lainnya berstatus tidak miskin multidimensi.



Gambar 3. Persentase Rumah Tangga berdasarkan Status Miskin Multidimensi di Provinsi Banten tahun 2020

Jika deprivasi rumah tangga ditinjau menurut dimensi, rumah tangga terdeprivasi paling banyak pada dimensi kesehatan sebesar 39,83%. Sementara itu, pada dimensi pendidikan dan standar hidup, persentase rumah tangga yang mengalami deprivasi masing-masing sebesar 19,56% dan 13,27%. Selanjutnya, persentase rumah tangga yang terdeprivasi berdasarkan indikator pembentuk kemiskinan multidimensi dapat ditinjau pada Gambar 4.



Gambar 4. Persentase Rumah Tangga yang Terdeprivasi pada Setiap Indikator Kemiskinan Multidimensi di Provinsi Banten Tahun 2020

Gambar 4 memperlihatkan bahwa rumah tangga paling banyak terdeprivasi pada indikator sumber air yaitu sebesar 26,58%. Artinya, sebanyak 26 sampai 27 dari 100 rumah tangga di Provinsi Banten belum menggunakan atau mengonsumsi air bersih yang layak, yaitu sumber air yang digunakan bukan berasal dari ledeng meteran dan

ledeng eceran, atau menggunakan air minum dari pompa, sumur terlindung/ mata air terlindung yang berjarak < 10 meter dari tangki septik. Hasil eksplorasi data menunjukkan bahwa rumah tangga yang terdeprivasi pada indikator sumber air minum di Banten didominasi oleh rumah tangga yang menggunakan air minum dari

pompa, sumur terlindung/mata air terlindung yang berjarak < 10 meter dari tangki septik. Hal ini sering terjadi pada daerah permukiman dengan luas lahan yang terbatas. Dengan keterbatasan tersebut, sangat mungkin jarak antara tangki septik dengan sumber air yang digunakan rumah tangga akan berdekatan (Nazar dkk., 2012). Kondisi tersebut juga berkaitan dengan populasi penduduk dan kepadatan penduduk yang tinggi, serta kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai syarat tangki septik yang layak (Swastika & Dwipayanti, 2012). Selanjutnya, indikator dengan deprivation paling sedikit (0,52%) adalah penerangan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa hampir semua rumah tangga di Provinsi Banten tahun 2020 sudah memiliki sumber penerangan yang layak yang bersumber dari listrik PLN.

Di tingkat kabupaten/kota, persentase rumah tangga miskin multidimensi bervariasi.

Kabupaten Lebak memiliki persentase rumah tangga miskin multidimensi sebesar 27,53%, diikuti oleh Kabupaten Pandeglang sebesar 22,12%. Persentase yang relatif rendah terdapat di Kota Cilegon, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan masing-masing sebesar 1,38%; 0,81%; dan 0,25%. Tiga wilayah lainnya, yaitu Kabupaten Serang, Kota Serang, dan Kabupaten Tangerang memiliki persentase rumah tangga miskin multidimensi masing-masing sebesar 5,80%; 2,85%; dan 2,24%.

Gambaran Umum Kemiskinan Multidimensi Rumah Tangga di Provinsi Banten Tahun 2020 Berdasarkan Variabel Level Individual dan Kontekstual

Dari hasil pengolahan data, karakteristik rumah tangga di Provinsi Banten tahun 2020 berdasarkan variabel level individual disajikan pada Tabel 3.

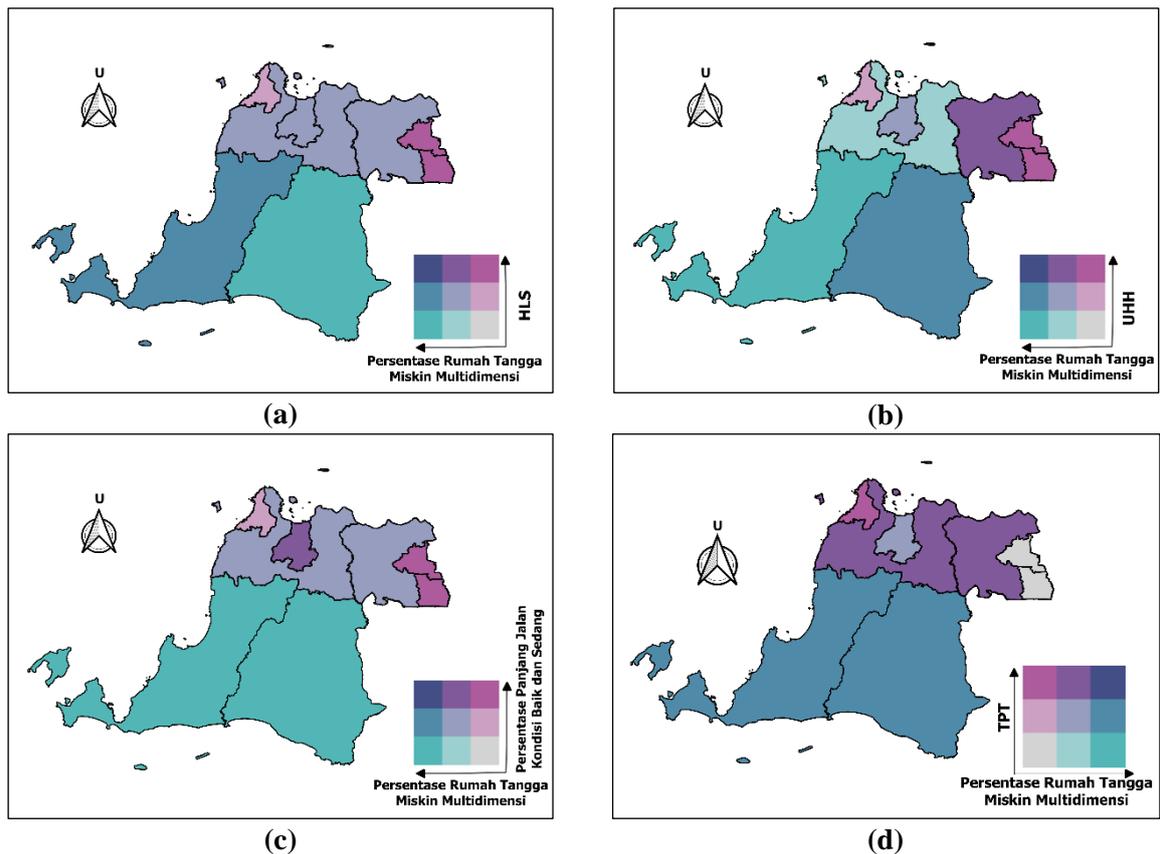
Tabel 3. Karakteristik Rumah Tangga di Provinsi Banten berdasarkan Variabel Level Individual

No	Variabel	Kategori	Persentase	Status Miskin Multidimensi	
				Miskin (%)	Tidak Miskin (%)
1	Umur KRT	< 40 tahun	24,4	8,8	91,2
		40–60 tahun	57,5	7,4	92,6
		> 60 tahun*	18,1	9,1	90,9
2	Jenis kelamin KRT	Perempuan	15,4	9,3	90,7
		Laki-laki*	84,6	7,8	92,2
3	Pendidikan tertinggi KRT	≤ SD	46,8	13,5	86,5
		SMP	14,2	5,3	94,7
		SMA	29,5	3,1	96,9
		PT*	9,5	0,9	99,1
4	Jenis pekerjaan KRT	Tidak bekerja	15,0	6,8	93,2
		Bekerja di sektor pertanian	16,1	24,5	75,5
		Bekerja di sektor non pertanian*	68,9	4,5	95,5
5	Jumlah ART	> 4 Orang	29,9	9,5	90,5
		≤ 4 Orang*	70,1	7,5	92,5
6	Klasifikasi wilayah tempat tinggal	Perdesaan	35	19,2	80,8
		Perkotaan*	65	2,1	97,9
7	Status miskin moneter rumah tangga	Miskin moneter	4,9	21,3	78,7
		Tidak miskin moneter	95,1	7,4	92,6

Tabel 3 menunjukkan bahwa rumah tangga dengan KRT berpendidikan maksimal SD, KRT perempuan, KRT bekerja di sektor pertanian, jumlah anggota rumah tangga (ART) lebih dari empat orang, tinggal di wilayah perdesaan, KRT berumur di atas 60 tahun, dan berstatus miskin

moneter memiliki persentase rumah tangga yang berstatus miskin multidimensi lebih besar.

Selanjutnya, Gambar 5 menunjukkan gambaran umum status miskin multidimensi rumah tangga berdasarkan variabel level kontekstual di Provinsi Banten tahun 2020.



Gambar 5. Persentase Rumah Tangga Miskin Multidimensi di Provinsi Banten tahun 2020:
(a) Berdasarkan Harapan Lama Sekolah (HLS); (b) Berdasarkan Umur Harapan Hidup (UHH); (c) Berdasarkan Persentase Panjang Jalan Kondisi Baik dan Sedang;
(d) Berdasarkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Gambar 5(a) sampai Gambar 5(c) menunjukkan bahwa kabupaten/kota dengan persentase jalan kondisi baik dan sedang yang tinggi, HLS yang tinggi, dan UHH yang tinggi cenderung memiliki persentase rumah tangga miskin multidimensi yang rendah, begitu juga sebaliknya. Sementara itu, Gambar 5(d) menunjukkan bahwa kabupaten/kota di Provinsi Banten yang memiliki TPT yang tinggi cenderung memiliki persentase rumah tangga miskin multidimensi yang tinggi pula, begitu juga sebaliknya. Kondisi yang berbeda terjadi di Kota Cilegon. TPT dan persentase rumah tangga miskin multidimensi di wilayah ini memiliki arah yang berlawanan. Kondisi ini dapat terjadi dikarenakan penduduk yang menganggur masih ditanggung oleh anggota keluarga lain yang memiliki penghasilan yang relatif tinggi. Oleh karena itu, peningkatan jumlah penganggur tidak ikut meningkatkan jumlah penduduk miskin (Yacoub, 2012). Hal ini

dapat terjadi dikarenakan tingkat pendidikan yang rendah dapat memengaruhi pendapatan yang dihasilkan. Rilis BPS Provinsi Banten (2019) menunjukkan bahwa penganggur terbuka di Kota Cilegon masih didominasi oleh lulusan SMA/ sederajat (56,81%). Hasil analisis juga menunjukkan bahwa penganggur terbuka dengan persentase terendah (3,73%) adalah penduduk yang tidak memiliki ijazah SD. Situasi ini menggambarkan kondisi sebagian besar pasar tenaga kerja diisi oleh mereka yang berpendidikan rendah. Hal ini juga dapat terjadi karena penduduk yang bekerja memiliki tingkat produktivitas yang rendah. Rendahnya produktivitas kerja mengakibatkan pendapatan kerja yang diperoleh menjadi lebih sedikit sehingga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, terlebih jika memiliki jumlah anggota rumah tangga yang besar.

Variabel Level Individual dan Kontekstual yang Memengaruhi Status Miskin Multidimensi Rumah Tangga di Provinsi Banten Tahun 2020

Berdasarkan hasil pengolahan data, uji signifikansi *random effect* memperlihatkan bahwa nilai statistik *Likelihood Ratio* (LR) pada *null model* sebesar $848,44 > \chi^2_{(0,05;1)} = 3,841$ dengan *p-value* $> 0,001$ ($\alpha = 0,05$) sehingga menghasilkan keputusan tolak H_0 , atau *random effect* signifikan. Dapat disimpulkan bahwa model regresi logistik biner multilevel lebih cocok digunakan dalam menganalisis status miskin multidimensi rumah tangga di Provinsi Banten tahun 2020 dibandingkan dengan model regresi logistik biner satu level dengan tingkat signifikansi sebesar 5%.

Selanjutnya, hasil perhitungan nilai ICC adalah 0,46. Artinya, 46,13% variasi status miskin multidimensi rumah tangga diakibatkan oleh

perbedaan karakteristik kabupaten/kota. Menurut Sorra dan Dyer (2010), nilai ICC di atas 5% sudah mampu menunjukkan variasi antar kelompok dan efek dari kelompok berpengaruh terhadap respons individu, sehingga pemodelan multilevel diperlukan.

Langkah berikutnya adalah menguji signifikansi parameter secara simultan. Dari hasil pengolahan data, diperoleh nilai statistik uji G sebesar $201,44 > \chi^2_{(0,05;15)} = 25,00$ sehingga keputusan yang dihasilkan yaitu tolak H_0 . Artinya, terdapat minimal satu variabel prediktor yang memengaruhi status miskin multidimensi rumah tangga di Provinsi Banten tahun 2020 dengan tingkat signifikansi 5%. Setelah diperoleh keputusan tolak H_0 pada uji simultan, uji signifikansi parameter secara parsial dilakukan. Tabel 4 menyajikan hasil uji signifikansi parameter secara parsial dari tiap variabel.

Tabel 4. Hasil Pengujian Signifikansi Parameter Secara Parsial

Variabel	$\hat{\beta}$	SE($\hat{\beta}$)	Z	P-value
Faktor Individual				
Umur KRT				
< 40 tahun	0,069	0,146	0,47	0,637
40-60 tahun	-0,081	0,129	-0,63	0,528
> 60 tahun (<i>reference</i>)				
Jenis kelamin KRT				
Perempuan	0,200	0,142	1,41	0,158
Laki-laki (<i>reference</i>)				
Pendidikan tertinggi KRT				
Maksimal SD *	1,454	0,427	3,40	0,001
SMP*	0,909	0,448	2,03	0,042
SMA*	0,888	0,441	2,01	0,044
PT (<i>reference</i>)				
Pekerjaan KRT				
Tidak bekerja	0,209	0,167	1,26	0,209
Bekerja di sektor pertanian*	0,658	0,112	5,90	<0,001
Bekerja di sektor non pertanian (<i>reference</i>)				
Jumlah ART				
> 4 Orang*	0,383	0,105	3,66	<0,001
≤ 4 Orang (<i>reference</i>)				
Klasifikasi wilayah tempat tinggal				
Perdesaan*	0,790	0,144	5,48	<0,001
Perkotaan (<i>reference</i>)				
Status miskin moneter rumah tangga				
Miskin moneter*	0,520	0,155	3,36	0,001
Tidak miskin moneter (<i>reference</i>)				
Faktor Kontekstual				
Harapan lama sekolah (RLS)*	-0,557	0,090	-6,23	<0,001
Umur harapan hidup (UHH)	-0,065	0,040	-1,62	0,105

Variabel	$\hat{\beta}$	SE($\hat{\beta}$)	Z	P-value
Faktor Kontekstual				
Tingkat pengangguran terbuka (TPT)*	-0,142	0,059	-2,40	0,016
Persentase panjang jalan dengan kondisi baik dan sedang*	-0,062	0,009	-7,28	<0.001
Konstanta	13,354	3,489	3,83	<0.001

Sumber: Olah data Susenas Kor 2020

Keterangan: *Variabel signifikan pada tingkat signifikansi 5%

Tabel 4 memperlihatkan bahwa variabel yang berpengaruh secara parsial terhadap status miskin multidimensi rumah tangga di Provinsi Banten tahun 2020 pada tingkat signifikansi 5% adalah pendidikan tertinggi KRT, pekerjaan KRT, jumlah anggota rumah tangga (ART), klasifikasi wilayah tempat tinggal, status miskin moneter rumah tangga, harapan lama sekolah (HLS), tingkat pengangguran terbuka (TPT), dan persentase panjang jalan dengan kondisi baik dan sedang. Variabel yang tidak signifikan berpengaruh secara parsial adalah umur KRT, jenis kelamin KRT, dan umur harapan hidup (UHH).

Variabel umur KRT yang tidak berpengaruh signifikan berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan rumah tangga dengan KRT berumur tua di Provinsi Banten masih bisa ditopang oleh ART lain yang bekerja. Oleh karena itu, umur KRT tidak berpengaruh terhadap kemiskinan

multidimensi rumah tangga. Variabel jenis kelamin KRT tidak berpengaruh signifikan terkait dengan banyaknya wanita yang menjadi KRT karena suami atau anaknya merantau. Mereka mendapatkan dukungan untuk memenuhi kebutuhan hidup dasarnya dari anggota rumah tangga yang merantau tersebut. Sementara itu, variabel UHH tidak berpengaruh secara signifikan dikarenakan semakin banyaknya penduduk miskin yang memiliki jaminan sosial sehingga rendahnya tingkat kesehatan masyarakat yang tercermin dari UHH yang rendah tidak selalu berkaitan dengan penduduk miskin (Dwiono, 2021).

Kecenderungan Variabel Level Individual dan Kontekstual yang Memengaruhi Status Miskin Multidimensi Rumah Tangga di Provinsi Banten Tahun 2020

Nilai *odds ratio* (OR) dari variabel yang signifikan tertera pada Tabel 5.

Tabel 5. Odds ratio Variabel yang Berpengaruh Signifikan

Variabel	OR
Faktor Individual	
Pendidikan tertinggi KRT (Maksimal SD)	4,2792
Pendidikan tertinggi KRT (SMP)	2,4818
Pendidikan tertinggi KRT (SMA)	2,4311
Pekerjaan KRT (Bekerja di sektor pertanian)	1,9314
Jumlah ART (> 4 Orang)	1,4664
Klasifikasi wilayah tempat tinggal (Perdesaan)	2,2041
Status miskin moneter rumah tangga (Miskin moneter)	1,6825
Faktor Kontekstual	
Harapan lama sekolah (RLS)	0,5728
Tingkat pengangguran terbuka (TPT)	0,8680
Persentase panjang jalan dengan kondisi baik dan sedang	0,9399

Sumber: Susenas Kor 2020 (diolah)

Pada variabel pendidikan tertinggi KRT, rumah tangga dengan KRT berpendidikan tertinggi maksimal SD memiliki kecenderungan untuk menjadi miskin multidimensi 4,28 kali lebih besar dibanding rumah tangga dengan KRT berpendidikan tertinggi perguruan tinggi (PT) dengan asumsi variabel lain dianggap konstan. Selanjutnya, rumah tangga dengan KRT

berpendidikan tertinggi SMP memiliki kecenderungan untuk menjadi miskin multidimensi 2,48 kali lebih besar dibanding rumah tangga dengan KRT berpendidikan tertinggi PT dengan asumsi variabel lain dianggap konstan. Sementara itu, rumah tangga dengan KRT berpendidikan tertinggi SMA memiliki kecenderungan untuk menjadi miskin

multidimensi 2,43 kali lebih besar dibanding rumah tangga dengan KRT berpendidikan tertinggi PT dengan asumsi variabel lain dianggap konstan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pendidikan KRT, semakin kecil kecenderungan rumah tangga untuk mengalami kemiskinan multidimensi. KRT yang berpendidikan lebih siap menghadapi risiko dan ketidakpastian, lebih baik dalam mengonversi pendapatan, lebih peduli terhadap pendidikan anak, serta lebih memperhatikan kesehatan dan standar hidup yang layak (Adepoju & Oyewole, 2020).

Variabel pekerjaan KRT memiliki nilai OR sebesar 1,93 yang artinya rumah tangga dengan KRT bekerja di sektor pertanian memiliki kecenderungan menjadi miskin multidimensi 1,93 kali lebih besar dibanding rumah tangga dengan KRT bekerja di sektor nonpertanian jika variabel lain dianggap konstan. Fadhilasari (2015) menemukan bahwa KRT miskin yang bekerja di sektor pertanian biasanya bekerja sebagai buruh dengan upah rendah karena mereka tidak memiliki lahan sendiri. Salam dkk. (2020) menjelaskan salah satu penyebab usaha pertanian belum mampu meningkatkan kesejahteraan petani karena sebagian besar usaha tersebut masih dilakukan secara tradisional oleh petani kecil.

Pada variabel jumlah ART, rumah tangga dengan jumlah ART lebih dari empat orang cenderung 1,47 kali lebih besar untuk menjadi miskin multidimensi dibanding rumah tangga dengan jumlah ART maksimal empat orang dengan asumsi variabel lain dianggap konstan. Rumah tangga miskin cenderung memiliki jumlah anak yang lebih banyak dibandingkan dengan rumah tangga tidak miskin akibat kurangnya pengetahuan dan akses terhadap Keluarga Berencana (KB), serta anggapan bahwa anak adalah jaminan masa depan bagi orang tua (BPS, 2005). Salam dkk. (2020) menemukan bahwa ukuran keluarga yang besar akan menambah beban keuangan, terutama keluarga yang memiliki banyak tanggungan pada anak/balita dan lansia.

Pada variabel klasifikasi wilayah tempat tinggal, rumah tangga di perdesaan memiliki

kecenderungan 2,20 kali lebih besar untuk menjadi miskin multidimensi dibanding rumah tangga di perkotaan dengan asumsi variabel lain dianggap konstan. Hasil ini selaras dengan Todaro (2010) yang mengemukakan bahwa investasi pemerintah di negara-negara berkembang pada sektor pendidikan, kesehatan, perumahan, dan pelayanan masyarakat masih belum maksimal di daerah perdesaan. Selain itu, daerah perdesaan masih mengalami permasalahan terkait keterbatasan infrastruktur dan keterisolasian wilayah.

Pada variabel status miskin moneter, rumah tangga yang berstatus miskin moneter cenderung 1,68 kali lebih besar untuk berstatus miskin multidimensi dibanding rumah tangga yang tidak miskin moneter dengan asumsi variabel lain dianggap konstan. Hal ini mengindikasikan bahwa kondisi ekonomi rumah tangga dapat memengaruhi berbagai dimensi kesejahteraan. Aset keuangan memungkinkan rumah tangga untuk berfungsi secara finansial, menjaga kesehatan dan standar hidup, digunakan sebagai asuransi, dan menciptakan peluang.

Pada level kontekstual, nilai OR dari variabel TPT sebesar 0,87 berarti kecenderungan rumah tangga untuk menjadi miskin multidimensi menjadi 0,87 kali lebih besar atau $1/0,87=1,15$ kali lebih kecil untuk tiap peningkatan TPT sebesar 1% jika variabel lain dianggap konstan. Hasil ini tidak sesuai dengan kajian sebelumnya yang menyatakan bahwa TPT dan kemiskinan memiliki hubungan positif (BPS, 2005). Yacoub (2012) menjelaskan bahwa hal ini dapat terjadi karena pengangguran tidak serta merta membuat seseorang menjadi miskin. Hal ini sering terjadi pada pengangguran terdidik yang pada umumnya berasal dari keluarga “mampu” sehingga walaupun menganggur, kebutuhan hidupnya masih dapat dipenuhi oleh anggota keluarga lainnya yang bekerja dengan pendapatan yang cukup. Hal ini didukung dengan data yang menunjukkan bahwa sebanyak 61,24% penduduk yang termasuk pengangguran terbuka di Banten pada tahun 2020 merupakan lulusan SMA/ sederajat dan PT atau termasuk ke dalam kategori pengangguran terdidik (BPS Banten, 2021). Hal ini juga dikarenakan tingkat produktivitas pekerja yang rendah, sehingga

pendapatan yang diperoleh menjadi lebih sedikit dan tidak cukup untuk kebutuhan hidupnya.

Nilai OR variabel persentase panjang jalan dengan kondisi baik dan sedang sebesar 0,94. Dengan kata lain, kecenderungan rumah tangga untuk menjadi miskin multidimensi menjadi 0,94 kali lebih besar atau $1/0,94=1,06$ kali lebih kecil untuk tiap peningkatan persentase panjang jalan dengan kondisi baik dan sedang sebesar 1% jika variabel lain dianggap konstan. Gurley dkk. (2003) mengemukakan bahwa akses jalan yang memadai akan meningkatkan peluang pemasaran bagi petani, akses fasilitas kesehatan dan pendidikan yang lebih mudah dan murah, serta memelihara hubungan antar komunitas dan keluarga.

Nilai OR variabel HLS sebesar 0,57 berarti bahwa kecenderungan rumah tangga untuk menjadi miskin multidimensi menjadi 0,53 kali lebih besar atau $1/0,57=1,75$ kali lebih kecil untuk tiap peningkatan HLS sebesar 1 tahun jika variabel lain dianggap konstan. Pendidikan yang berkualitas dapat meningkatkan produktivitas kerja melalui pengembangan sumber daya manusia sehingga mampu menciptakan kesejahteraan yang lebih baik. Hasil ini juga menegaskan peran pendidikan sebagai cara untuk keluar dari lingkaran kemiskinan (Todaro, 2010).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan sebelumnya, kajian ini menemukan bahwa terdapat 8,07% rumah tangga yang berstatus miskin multidimensi di Provinsi Banten tahun 2020. Wilayah dengan persentase rumah tangga miskin multidimensi tertinggi adalah Kabupaten Lebak dan terendah adalah Kota Tangerang Selatan. Dilihat berdasarkan deprivasinya, rumah tangga terdeprivasi paling sedikit pada dimensi standar hidup dan paling banyak pada dimensi kesehatan. Menurut indikator, rumah tangga terdeprivasi paling sedikit pada indikator penerangan dan paling banyak pada indikator sumber air. Selanjutnya, rumah tangga yang mengalami kemiskinan multidimensi paling banyak ditemukan pada rumah tangga yang memiliki KRT berumur kurang dari 40 tahun, KRT perempuan, KRT dengan pendidikan tertinggi maksimal SD, KRT bekerja di sektor pertanian,

tinggal di wilayah perdesaan, jumlah ART lebih dari empat orang, dan berstatus miskin moneter.

Variabel yang berpengaruh signifikan terhadap status miskin multidimensi rumah tangga adalah pendidikan tertinggi kepala rumah tangga, jenis pekerjaan kepala rumah tangga, jumlah ART, klasifikasi wilayah tempat tinggal, dan status miskin moneter, HLS, TPT, serta persentase panjang jalan dengan kondisi baik dan sedang. Rumah tangga yang memiliki KRT berpendidikan lebih rendah, KRT bekerja di sektor pertanian, jumlah ART lebih dari empat orang, tinggal di wilayah perdesaan, dan berstatus miskin moneter memiliki kecenderungan lebih besar untuk berstatus miskin multidimensi. Kabupaten/kota dengan TPT yang rendah, persentase panjang jalan dengan kondisi baik dan sedang yang rendah, dan HLS yang rendah akan menaikkan kecenderungan rumah tangga untuk mengalami kemiskinan multidimensi.

Berdasarkan hasil kajian ini, berbagai rekomendasi kebijakan dapat dirumuskan untuk pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Banten. Salah satunya adalah peningkatan penyediaan fasilitas kebutuhan rumah tangga seperti sumber air minum, fasilitas sanitasi, dan bahan bakar memasak, serta sosialisasi tentang hidup bersih (terkait sanitasi, air minum, dan sebagainya) diperlukan di setiap wilayah kabupaten/kota. Selanjutnya, temuan cukup tingginya persentase rumah tangga yang terdeprivasi pada indikator PAUD mengindikasikan pentingnya pemahaman orang tua terkait keikutsertaan anak usia dininya pada pendidikan prasekolah. Selain itu, pemerintah diharapkan dapat meningkatkan penyediaan layanan serta sarana pendidikan prasekolah, terutama di daerah terpencil dan terisolir, serta mengalokasikan lebih banyak tenaga pendidik PAUD atau pendidikan prasekolah. Program untuk mendorong masyarakat agar menempuh pendidikan yang lebih tinggi juga perlu ditingkatkan mengingat pentingnya pengaruh pendidikan kepala rumah tangga terhadap status miskin multidimensi rumah tangga. Program tersebut dapat berupa pemberian beasiswa atau bantuan serta peningkatan kualitas dan kuantitas

fasilitas pendidikan. Perbaikan pada kualitas sumber daya manusia di wilayah perdesaan (terutama KRT) juga dapat dilakukan dengan mengembangkan keahlian dan keterampilan penduduk agar dapat meningkatkan produktivitas dan mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi dan mampu memenuhi kebutuhan dasar rumah tangganya.

Peningkatan produktivitas pada sektor pertanian juga perlu dilakukan dengan meningkatkan akses kredit, revitalisasi pertanian, sosialisasi dan meningkatkan pemanfaatan teknologi dalam bidang pertanian dikarenakan rumah tangga dengan KRT bekerja di sektor pertanian dan tinggal di wilayah perdesaan memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk mengalami kemiskinan multidimensi. Tidak hanya itu, penciptaan kesempatan kerja yang lebih banyak diperlukan bagi para angkatan kerja terdidik, terutama di industri padat karya yang banyak menyerap tenaga kerja. Penciptaan lapangan pekerjaan secara mandiri, misalnya pengembangan usaha mikro kecil dan menengah, juga perlu didorong. Dengan demikian, angkatan kerja terdidik diharapkan bisa lebih banyak berkontribusi terhadap pengurangan kemiskinan multidimensi.

Kajian selanjutnya mengenai kemiskinan diharapkan lebih banyak menggunakan pendekatan kemiskinan multidimensi, karena lebih mampu menangkap permasalahan kemiskinan secara utuh.

DAFTAR PUSTAKA

- Adepoju, A., & Oyewole, O. (2020). Determinants of multidimensional poverty transitions among rural households in Nigeria. *Review of Agricultural and Applied Economics (RAAE)*, 23(1), 55-64. <https://doi.org/10.22004/ag.econ.308392>
- Alkire, S. & Foster, J. (2007). Counting and multidimensional poverty measurement. *OPHI Working Paper 7*, University of Oxford.
- Alkire, S., & Santos, M. E. (2014). Measuring acute poverty in the developing world: Robustness and scope of the multidimensional poverty index. *World Development*, 59, 251–274. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2014.01.026>
- BPS [Badan Pusat Statistik]. (2005). *Analisis dan penghitungan tingkat kemiskinan 2005*. Badan Pusat Statistik.
- _____. (2021). *Statistik Indonesia 2021*. Badan Pusat Statistik.
- BPS Provinsi Banten. (2019, 5 November). *Keadaan ketenagakerjaan Banten Agustus 2019*. Berita Resmi Statistik No. 63/11/36/Th.XIII. <https://banten.bps.go.id/pressrelease/2019/11/05/500/keadaan-ketenagakerjaan-banten-agustus-2019.html>
- _____. (2021). *Provinsi Banten dalam angka 2020*. BPS Provinsi Banten.
- Bradshaw, T. K. (2007). Theories of poverty and anti-poverty programs in community development. *Community Development*, 38(1), 7–25. <https://doi.org/10.1080/15575330709490182>
- Calnitsky, D. (2018). Structural and individualistic theories of poverty. *Sociology Compass*, 12(12), e12640. <https://doi.org/10.1111/soc4.12640>
- Dwiono, F. H. (2021). *Determinan kemiskinan kabupaten/kota di Pulau Jawa tahun 2019*. [Skripsi]. Politeknik Statistika STIS Jakarta.
- Fadhilasari, N. L. (2015) *Pengaruh karakteristik rumah tangga dan infrastruktur terhadap status kemiskinan rumah tangga di Jawa Tengah (berdasarkan Susenas dan Podes tahun 2011)* [Skripsi]. Politeknik Statistika STIS Jakarta.
- Gurley, C., Greening, A., & Jones, D. (2003, 19-25 Oktober). Paving the way for rural development & poverty reduction [Paper presentation]. The XXIIInd PIARC World Road Congress, Durban, South Africa.
- Hox, J. J. (2010). *Multilevel analysis: Techniques and applications (2nd ed.)*. Routledge.
- Huda, D. A. N. (2020). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap kemiskinan multidimensional di negara

- berkembang dengan pendekatan regresi nonparametrik. *STATISTIKA*, 20(2), 75-82.
<https://doi.org/10.29313/jstat.v20i2.7148>
- Laderchi, C. R., Saith, R., & Stewart, F. (2003). Does it matter that we do not agree on the definition of poverty? A comparison of four approaches. *Oxford Development Studies*, 31(3), 243-274.
<https://doi.org/10.1080/1360081032000111698>
- Nazar, H., Kasry, A., & Saam, Z. (2012). Kebijakan pengendalian pencemaran sumber air bersih perumahan sederhana di Kota Pekanbaru (Kasus di Kecamatan Tampan). *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 4(1), 63-80.
<https://doi.org/10.31258/jil.4.1.p.63-80>
- Perkumpulan Prakarsa. (2020). *Indeks kemiskinan multidimensi Indonesia 2015-2018*. Perkumpulan Prakarsa.
- Royce, E. (2019). *Poverty and power: The problem of structural inequality (3rd edition)*. The Rowman & Littlefield Publishing Group, Inc.
- Salam, A., Pratomo, D. S., & Saputra, P. M. A. (2020). Socio-economic determinants of multidimensional poverty in the rural and urban areas of East Java. *International Journal of Scientific & Technology Research*, 9(4), 1445-1449.
- Sekarwati, A. (2019). *Kemiskinan multidimensi dan variabel-variabel yang memengaruhinya di Provinsi Bengkulu tahun 2017* [Skripsi]. Politeknik Statistika STIS Jakarta.
- Sen, A. (1985). *Commodities and capabilities*. Oxford University Press.
- _____. (1989). Development as capability expansion. *Journal of Development Planning*, 19, 41-58.
- _____. (1999). *Development as freedom*. Oxford University Press.
- Setyani, A. (2021). *Analisis Spasial Kemiskinan Multidimensi di Kawasan Timur Indonesia Tahun 2018* [Skripsi, Politeknik Statistika STIS Jakarta].
- Swastika, D. G., & Dwipayanti, U. (2012). Faktor pengaruh terhadap ketersediaan septic tank dan sambungan sewerage system permukiman pinggir kali, Kel. Dangan Puri, Denpasar. *Archive of Community Health*, 1(1), 55-62.
<https://doi.org/10.24843/ACH.2012.v01.i01.p09>
- Sorra, J. S., & Dyer, N. (2010). Multilevel psychometric properties of the AHRQ hospital survey on patient safety culture. *BMC Health Services Research*, 10(1), 199.
<https://doi.org/10.1186/1472-6963-10-199>
- Todaro, M. P. (2010). *Pembangunan ekonomi*. Bumi Aksara.
- Usman, M. (2017). *Determinan kemiskinan multidimensi di Kawasan Indonesia Timur Indonesia periode 2010-2015* [Skripsi]. Politeknik Statistika STIS Jakarta.
- World Bank. (2015). *Handbook on poverty and inequality*. World Bank Group.
- Yacoub, Y. (2012). Pengaruh tingkat pengangguran terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 8(3), 176-185.